

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BAYI  
OLEH IBU KANDUNGNYA  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**MAHARANI ADHYAKSANTARI WICAKSANA**  
**C100130007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BAYI  
OLEH IBU KANDUNGNYA  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**MAHARANI ADHYAKSANTARI WICAKSANA  
C100130007**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muchamad Iksan', is written over a horizontal line.

**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BAYI OEH  
IBU KANDUNGNYA**

**(Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)**

Yang ditulis oleh :

**MAHARANI ADHYAKSANTARI WICAKSANA**

C.100.130.007

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, SH., M.H

Sekretaris : Hartanto, SH., M.Hum

Anggota : Sudaryono, SH., M.Hum

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Maret 2017

Yang menyatakan



MAHARANI ADHYAKSANTARI WICAKSANA  
C100130007

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BAYI  
OLEH IBU KANDUNGNYA  
(Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung, untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: penyidik, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Penegakan hukum dalam penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka, berupa ketentuan dalam Pasal 341 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** penegakan hukum, pembunuhan bayi, ibu kandung.

**ABSTRACT**

This research aims to know the profile of legal rule related to the criminal act of murdering a baby committed by its biological mother, to know the law enforcement of criminal act of murdering a baby in which the perpetrator is its biological mother in Polresta Surakarta and Polres Wonogiri, as well as to know which factors cause the criminal act occurrence of murdering a baby in which the perpetrator is its biological mother. The method of approach used by the writer is the juridical empirical approach. Kind of research used by the writer in this research is the descriptive research. The locations of the research are in Polresta Surakarta and Polres Wonogiri. This research used primary data source and secondary data source. The method of data collection in this research used the techniques of library study and field study through interview and observation with the sources who were considered as knowing the background of problem. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the law enforcement by the police side in conducting the investigation process on the criminal act of murdering a baby committed by its biological mother covers: investigation, action, deep investigation, settlement, and case file delivery. The law enforcement in the implementation of article to suspect the suspect is the provision in Article 341 KUHP and Act Number 23 of 2002 regarding the Children Protection.

**Keywords:** law enforcement, murdering a baby, biological mother.

## 1. PENDAHULUAN

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian merupakan hal utama yang harus dilakukan, demi menjamin keadilan terhadap hak hidup korban, serta untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>2</sup> Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>2</sup> Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diakses pada hari Senin 12 September 2016. Pukul 13:35.

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>3</sup> Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencangkup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan yang dikaji penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung, untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data.<sup>5</sup> Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Profile Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya**

Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>6</sup> Secara umum ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam pasal 341 dan 342. Pasal 341 dimaksudkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan ketentuan Pasal 342, dimaksudkan bahwa pembunuhan terhadap bayi oleh ibunya secara berencana.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 309.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 24.



### **3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Ketentuan lain yang mengatur mengenai pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, juga telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 80. Adapun ketentuan Pasal 80 tersebut, pidananya lebih berat dan dendanya cukup besar dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) ini bisa untuk menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Adapun ancaman hukuman ditambah sepertiganya.

### **3.1.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini memuat berbagai aspek dan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan lebih mengkhususkan kedalam tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, telah di atur di dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

### **3.1.4. Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Kasus Pembunuhan terhadap Bayi oleh Ibu Kandungnya**

Selain ketentuan yang menjerat langsung terhadap pelaku pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya di atas, masih ada ketentuan lain yang dapat menjerat pelaku kejahatan yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut, yaitu pelaku yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur. Ketentuan yang mengatur mengenai persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **3.2. Penegakan Hukum Tindak Kejahatan Pembunuhan Terhadap Bayi Dengan Pelaku Ibu Kandung Di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri**

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat, dapat tetap ditegakkan.<sup>7</sup> Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, merupakan termasuk dalam subsistem dari pada Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, dan Hakim di Pengadilan sebagai pemutus perkara. Pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisian dan hak asasi manusia. Pihak kepolisian menjadikan etika profesi hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas agar sesuai koridor hukum dan tidak melanggar sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Adapun kegiatan pokok pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: (1) Penyidik. (2) Penindak (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan). (3) Pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka). (4) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara).

Dari keempat kegiatan pokok proses penyidikan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya dianggap telah memenuhi persyaratan formil, yaitu menyangkut format administrasi penyidikan yakni melakukan pemeriksaan. Mengenai persyaratan materiil juga dianggap telah terpenuhi yaitu yang menyangkut substansi hukum yang di dalamnya harus memenuhi unsur-unsur

---

<sup>7</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesi*, Surakarta: UMS Press, 2009, hal. 40.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

pasal yang dipersangkakan, yakni Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP yang kedua-duanya harus terpenuhi.

Berdasarkan uraian Berita Acara Pemeriksaan di atas penulis berkesimpulan bahwa penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka telah dianggap sesuai, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, dimana tersangka telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau telah melakukan tindak pidana yang telah disangkakan dalam Pasal 341 KUHP, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.<sup>9</sup>

Pada kasus Yanita Pungkasari di Polresta Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut didasarkan karena polisi memilih Lex Specialis karena ancaman hukumannya lebih tinggi dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hukuman tersebut ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Berdasarkan pasal tersebut karena pelaku merupakan ibu kandung, maka hukuman terhadap pelaku tersebut ditambah sepertiga.

Sementara itu, dalam kasus Rina Purnama Sari bin Narto di Polres Wonogiri menggunakan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 341, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Penggunaan pasal tersebut dilatarbelakangi, bahwa pelaku melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak tersebut dilahirkan. Pelaku dalam hal ini merasa takut kalau kelahiran bayinya tersebut

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 341.

diketahui oleh orang lain, sehingga setelah bayi lahir kemudian dibekap pakai kain hingga meninggal dunia.

Berdasarkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya di atas, dapat diketahui bahwa salah satu latar belakang yang menyebabkan ibu kandungnya tega melakukan pembunuhan tersebut karena faktor kehamilan di luar nikah, yang menyebabkan korban malu atas peristiwa kehamilan tersebut. Sudah seharusnya kehamilan di luar pernikahan tersebut juga harus mendapatkan perhatian, apakah perbuatan persetubuhan yang menyebabkan kehamilan tersebut, dilakukan di saat perempuan tersebut masih di bawah umur atau tidak. Bagaimanapun perbuatan pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur, tidak dapat dibenarkan dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Perlindungan terhadap perempuan, terutama perempuan yang masih di bawah umur harus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan menghormati martabat, serta masa depan korban yang masih panjang. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus di Polresta Surakarta dimana pelaku pembunuhan terhadap bayi, yang bukan lain adalah ibu kandungnya dari bayi yang dibunuh sendiri, yakni Yanita Pungkasari alias Kiki ketika hamil di luar pernikahan tersebut sudah cukup umur, sehingga pelaku yang melakukan persetubuhan atau yang menghamili Yanita Pungkasari alias Kiki, tidak dapat dijerat dengan ketentuan undang-undang tentang persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur. Sedangkan kasus di Polres Wonogiri ibu kandung yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya sendiri, yakni Rina Purnama Sari bin Narto, ketika hamil masih di bawah umur, sehingga secara otomatis perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban Rina Purnama Sari bin Narto masih di bawah umur. Pelaku persetubuhan tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 287 Butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 5.

### **3.3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Pembunuhan Terhadap Bayi Dengan Pelaku Ibu Kandung**

#### **3.3.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Pembunuhan Terhadap Bayi Dengan Pelaku Ibu Kandung**

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Surakarta, bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya biasanya disebabkan oleh:<sup>11</sup>

##### **1) Takut Ketahuan Melahirkan Seorang Anak**

Motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Biasanya anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan oleh ibu kandungnya.

##### **2) Keadaan Mental Emosional Dari Si Ibu**

Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu, dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang.

Adapun faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### **1) Dari faktor psikis**

Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup.

##### **2) Dari faktor waktu**

Dari faktor waktu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut untuk menghilangkan nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.

---

<sup>11</sup> Wahyu Riyadi, Penyidik di Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 21 September 2016, Pukul 11:45 WIB.

<sup>12</sup> Endang Murdiyanti, Kepala Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 28 September 2016, Pukul 12:40 WIB.

3) Dari faktor ekonomi

Dari faktor ekonomi, yaitu ibu kandung yang tega melakukan perbuatan membunuh bayinya sendiri, karena merasa tidak mampu dari segi tingkat ekonomi atau tidak mampu untuk mengurus dan membiayai bayi yang dilahirkan tersebut.

**3.3.2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Kejahatan Pembunuhan Terhadap Bayi Dengan Pelaku Ibu Kandung**

Untuk menanggulangi terjadinya tindak kejahatan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya adalah dengan timbulnya kesadaran, bahwa:

- 1) Kehidupan anak merupakan hak yang harus dijamin dan dijunjung tinggi, sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
- 2) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- 3) Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Surakarta, bahwa upaya menanggulangi tindak kejahatan pembunuhan bayi dapat dilakukan dengan:<sup>13</sup>

- 1) Kesadaran akan nilai kemanusiaan dimulai dari kita sendiri, keluarga, dan lingkungan dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama.
- 2) Menjadikan agama sebagai tiang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan dari nilai-nilai kejahatan, nilai agama harus diajarkan kepada anak sebagai nilai dasar dalam kehidupan manusia.
- 3) Memahami bahwa melakukan hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang tercela dan berdosa, dimana akibat dari perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan tersebut, menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan bayi.

Pencegahan dan upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, merupakan salah satu solusi terbaik

---

<sup>13</sup> Wahyu Riyadi, Penyidik di Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 21 September 2016, Pukul 11:45 WIB.

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesigapan serta penyuluhan dan sosialisasi yang baik, oleh pihak kepolisian merupakan salah satu jalan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, selain memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

*Pertama*, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya, telah diatur secara jelas, seperti dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaannya untuk menjamin perlindungan anak dari tindak kekerasan dan pembunuhan oleh ibu kandungnya, serta untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelakunya.

*Kedua*, penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, meliputi: penyidik, penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka), penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara).

*Ketiga*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pembunuhan terhadap bayi dengan pelaku ibu kandung, meliputi keadaan dari faktor psikis (keadaan mental emosional dari si ibu), dari faktor waktu (takut ketahuan melahirkan seorang anak, sehingga setelah melahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan bayi tersebut langsung dibunuh), dari faktor ekonomi (karena merasa tidak mampu dari segi tingkat ekonomi atau tidak mampu untuk mengurus dan membiayai bayi yang dilahirkan tersebut).

### **4.2. Saran**

*Pertama*, diharapkan dengan adanya keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak kejahatan tersebut.

*Kedua*, sebaiknya penanganan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, harus menjadi perhatian khusus, sebab tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, seharusnya keberadaan anak harus mampu dijaga dan dipelihara sebagai anugerah, karena kelak akan menjadi penerus bangsa di kemudian hari.

*Ketiga*, sebaiknya upaya dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian ataupun masyarakat umum, harus lebih ditingkatkan lagi guna mencegah terjadinya kejahatan serupa, penegakan hukum yang disertai sanksi yang tegas juga harus dilakukan oleh aparat kepolisian agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

## **PERSANTUNAN**

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *ketiga*, pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di perkuliahan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi, 1990, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Iksan, Muchamad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: UMS-Press.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diakses pada hari Senin 12 September 2016. Pukul 13:35.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.